

BAB VI

PENUTUP

Bab ini mengulas tentang kesimpulan dari pembahasan terkait dengan judul penelitian serta rumusan masalah penelitian yang telah dibahas dalam bab-bab sebelumnya. Peneliti juga memberikan saran atau masukan bagi NGO dan Pemerintah Kota Mataram dalam mendorong KIP agar kedepan hubungan tersebut selalu dibangun dalam bingkai kerjasama yang lebih baik.

VI.1 Kesimpulan

a) Dimensi orientasi Isu

Nilai untuk indikator mempengaruhi agenda pemerintahan bernilai sedang yaitu 2,08. Demikian juga untuk indikator mempengaruhi aktivitas lembaga juga bernilai sedang yaitu 2,08. Hal tersebut menunjukkan bahwa NGO telah mempengaruhi agenda pemerintahan dalam melaksanakan UU KIP. Namun dapat dijelaskan bahwa hanya Firta NTB dan Somasi NTB yang paling aktif mempengaruhi agenda pemerintah. Sementara PD Muhammadiyah Kota Mataram, PD Pemuda Muhammadiyah

Kota Mataram serta Lakpesdam NU belum menunjukkan kegiatan kegiatan untuk mendorong agenda pemerintahan dalam melaksanakan KIP. Demikian pula pada indikator aktivitas kelembagaan dalam mendorong KIP hanya ditunjukkan oleh Fitra NTB dan Somasi NTB. Sementara lembaga lainnya tidak menunjukkan aktivitas kelembagaan yang berarti.

Terkait dengan tidak aktifnya PD Muhammadiyah Kota Mataram, PD Pemuda Muhammadiyah Kota Mataram dan Lakpesdam NU Kota Mataram dalam mendorong KIP disebabkan karena tidak memiliki program khusus dalam mendorong KIP. Selain itu, dalam visi-misi ke dua lembaga tersebut tidak disebutkan secara langsung tentang agenda penguatan tata kelola pemerintahan dan transparansi. Namun demikian, dukungan Muhammadiyah dan NU terhadap gerakan mendorong KIP tetap dilakukan dengan mengikuti kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Somasi NTB dan Fitra NTB. Muhammadiyah dan NU semata-mata menjadi komponen penguat legitimasi bagi NGO dalam mendorong KIP.

Pada dimensi orientasi isu menunjukkan bahwa pola hubungan civil society dan pemerintah lokal pada konteks kegiatan NGO dalam mendorong KIP sangat ditentukan oleh strategi yang dilakukan NGO. Strategi penyebaran isu KIP melalui media lokal sangat efektif dalam mempengaruhi pemerintah daerah. Selain itu, keterlibatan media sangat dominan dalam penyebaran isu KIP tersebut. Keterlibatan media terjadi karena didukung oleh sistem politik yang makin terbuka serta adanya kebebasan pers dalam memberikan kritik kepada pemerintah daerah. Pada sistem demokrasi, keberadaan media lokal sangat diperhitungkan dalam mendorong KIP di daerah.

Pola hubungan civil society dan pemerintah lokal pada konteks kegiatan NGO dalam mendorong KIP menunjukkan kolaborasi antara NGO dengan pemerintah daerah. Kolaborasi tersebut ditunjukkan melalui pendampingan dan asistensi teknis dalam penyusunan SLIP, SOP serta Perwal. Kolaborasi tersebut dilakukan karena NGO dan pemerintah daerah memiliki kepentingan yang sama menyangkut isu keterbukaan. NGO berkepentingan dengan keterbukaan informasi karena terkait

dengan kemudahan untuk mendapatkan data-data anggaran dan isu korupsi.

Sementara kemampuan NGO dalam mempengaruhi agenda pemerintah juga sangat ditentukan oleh kerjasama dengan lembaga internasional seperti Australian Aid. Kerjasama NGO dengan lembaga internasional tersebut didorong oleh kepentingan global yang menyangkut isu demokratisasi dan keterbukaan informasi. Dengan demikian, penerapan KIP di Kota Mataram ditentukan oleh empat komponen yaitu NGO, media lokal, lembaga internasional dan Pemerintah Kota Mataram.

b) Dimensi finansial

Nilai untuk indikator sumber keuangan NGO adalah 2,76 atau tinggi. Nilai tersebut menunjukkan bahwa sumber keuangan NGO dalam mendorong KIP sangat menentukan dalam mendorong KIP. Demikian juga pada indikator kemandirian keuangan NGO memperoleh nilai 2,76 atau tinggi. Hal tersebut menunjukkan bahwa kemandirian keuangan NGO dalam mendorong KIP sangat tinggi karena tidak tergantung dengan bantuan pemerintah daerah. Sementara pada indikator alokasi

keuangan dengan nilai 2,2 atau sedang. Hal ini menunjukkan bahwa alokasi keuangan NGO dalam mendorong KIP cukup baik karena telah sesuai dengan rencana kegiatan. Namun tidak semua NGO memiliki orientasi pembiayaan dalam mendorong KIP seperti PD Muhammadiyah Kota Mataram dan PD Pemuda Muhammadiyah Kota Mataram. Hal tersebut terjadi karena NU dan Muhammadiyah tidak memiliki kegiatan khusus dalam mendorong KIP.

Pola hubungan civil society dan pemerintah lokal pada konteks kegiatan NGO dalam mendorong KIP khususnya dalam konteks finansial menegaskan bahwa NGO memanfaatkan bantuan lembaga internasional. NGO tidak melakukan komitmen kerjasama keuangan dengan pemerintah daerah dalam kegiatan mendorong KIP. Hal tersebut dilakukan untuk mempertahankan kemandirian serta menghindari campur tangan pemerintah terhadap kegiatan-kegiatan NGO.

Hubungan NGO dengan pemerintah daerah hanya sebatas pada kerjasama perumusan kebijakan dalam pelaksanaan KIP di lembaga pemerintah seperti asistensi teknis pembuatan SLIP dan

SOP dalam pelaksanaan KIP. Kerjasama dalam perumusan kebijakan tersebut dilakukan karena pemerintah daerah memiliki kewenangan secara politik dan administratif dalam membuat aturan serta payung hukum pelaksanaan KIP di daerah.

c) Dimensi Kebijakan

Nilai untuk indikator strategi pemecahan masalah mendapat nilai 2 atau sedang. Hal tersebut menegaskan bahwa strategi pemecahan masalah dalam mendorong KIP sudah dilakukan oleh NGO. Strategi tersebut berupa permohonan serta uji akses informasi, *tracking* calon anggota Komisi Informasi serta diseminasi hasil riset. Semua tahapan dalam melaksanakan strategi tersebut berjalan sebagaimana yang telah direncanakan oleh NGO. Salah satu keberhasilan NGO adalah dengan terbentuknya Komisi Informasi NTB serta terbentuknya payung hukum pelaksanaan KIP. Namun strategi tersebut belum berjalan secara maksimal karena belum dapat mempengaruhi kualitas pelayanan informasi di lembaga pemerintah daerah.

Sementara nilai indikator partisipasi masyarakat mendapatkan nilai 1,48 atau rendah. Hal tersebut menegaskan

bahwa partisipasi masyarakat dalam mendorong KIP masih sangat rendah. Gerakan dalam mendorong KIP masih di dominasi oleh NGO dan tokoh masyarakat. NGO belum mendapatkan dukungan penuh dari masyarakat. Minimnya peran masyarakat juga disebabkan karena pemahaman masyarakat tentang KIP masih terbatas pada elite birokrasi, akademisi serta tokoh masyarakat.

Pola hubungan yang terjadi pada dimensi kebijakan menunjukkan bahwa pelaksanaan KIP sangat tergantung pada pemerintah daerah. Strategi NGO dalam mendorong KIP tidak akan berhasil jika tidak direspon oleh pemerintah daerah. Keberadaan NGO yang berada di luar pemerintah tidak dapat menentukan pelaksanaan KIP karena kewenangan pembuatan kebijakan ditentukan oleh pemerintah daerah. Namun strategi yang sudah dilakukan NGO sangat efektif untuk mendorong pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan seperti pembentukan dan penetapan anggota Komisi Informasi NTB dan pemberlakuan peraturan-peraturan teknis terkait pelayanan informasi melalui Peraturan Gubernur dan Peraturan Walikota.

d) Dimensi Organisasional

Nilai untuk indikator interdependensi yaitu 2,84 atau tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa telah terjadi kerjasama yang baik antara stakeholders yang berkepentingan dalam mendorong KIP. Begitu pula dengan nilai indikator independensi yaitu 2,76 atau tinggi. Hal tersebut menunjukkan bahwa independensi dalam merencanakan atau menggagas kegiatan NGO dalam mendorong KIP sangat tinggi.

Pola hubungan civil society dan pemerintah lokal pada indikator interdependensi menunjukkan bahwa pemerintah daerah dan Komisi Informasi paling menentukan pelaksanaan KIP di daerah. Pemerintah daerah dan Komisi Informasi memiliki power dan legitimasi yang paling kuat karena bekerja berdasarkan perintah UU KIP. Pemerintah daerah dan Komisi Informasi memiliki tiga atribut sekaligus yakni power, legitimasi dan urgensi. Pemerintah daerah memiliki power dalam mendorong KIP karena memiliki kekuatan otoritatif dalam melaksanakan tindakan-tindakan syah dalam melaksanakan KIP.

VI. 2. Saran

Kesimpulan di atas telah menggambarkan tentang dimensi-dimensi yang membentuk pola hubungan politik civil society dan Pemerintahan Lokal dalam mendorong KIP di Kota Mataram. Pola hubungan politik tersebut secara umum menggambarkan tentang hubungan yang saling mendukung atau saling membutuhkan antara civil society dengan Pemerintahan Lokal. Namun ada beberapa hal perlu perbaiki dalam pola hubungan tersebut melalui saran sebagai berikut:

1. Dalam mendorong Keterbukaan Informasi civil society memang telah menunjukkan kemandirian dalam pembiayaan karena tidak bergantung terhadap anggaran dari Pemerintahan Daerah. Kedepan hendaknya civil society juga memanfaatkan serta memaksimalkan sumber pendanaan lainnya, seperti pendanaan internal dan masyarakat. Hal ini penting sebagai bentuk penegasan civil society sebagai organisasi mandiri, sukarela dan wakil dari kepentingan masyarakat.

2. Hendaknya kedepan civil society harus membentuk forum bersama Pemerintahan Daerah sebagai medium komunikasi dalam menyerap berbagai isu dan gagasan yang muncul di kalangan civil society yang menyangkut kepentingan masyarakat, termasuk salah satunya dalam mendorong KIP. Sehingga dengan demikian, Pemerintahan Daerah dapat dengan mudah melakukan pemetaan masalah-masalah yang nantinya sebagai dasar dalam pembuatan kebijakan publik.
3. Civil society dalam hal ini LSM atau Organisasi Kemasyarakatan lainnya harus lebih banyak melakukan kerjasama dengan berbagai stakeholder tidak saja pada agenda-agenda serta kegiatan mendorong Keterbukaan Informasi Publik, namun pada agenda lain seperti isu-isu pemberantasan korupsi, transparansi anggaran serta penegakan hukum. Karena agenda-agenda tersebut juga menjadi bagian dari upaya mewujudkan pemerintahan akuntabel, transparan dan partisipatif.
4. Dalam mendukung implementasi UU KIP di Kota Mataram hendaknya jangan melalui Perwal semata, tapi menyusun

payung hukum dalam bentuk Perda. Dengan menggunakan Perda maka implementasi UU KIP tidak hanya mengikat kepada lembaga Pemerintahan Daerah saja, tapi juga mengikat kepada badan publik lainnya seperti perguruan tinggi negeri, korporasi yang menggunakan anggaran publik dan masyarakat secara luas sebagai penggunaan layanan informasi publik.